

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI DESA MULYOAGUNG KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

Implementation of Organic Waste Management Policy in Mulyoa gung Village Dau Sub-District Malang District

Firda Kalvira^{1*}
Roro Merry Chornelia
Wulndry¹
Ronny Erysa Novianto Putra¹

¹Universitas Tribhuwana
Tunggadewi, Malang

*corresponding author:
firdakalvira418@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program TPST 3R Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan menggunakan pendekatan teori Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih rendahnya efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, yang terlihat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan belum optimalnya koordinasi antar pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pemerintah desa, pengelola TPST, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui sosialisasi, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sumber daya manusia cukup tersedia, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam aspek teknis dan finansial. Disposisi pelaksana menunjukkan sikap positif dan dedikasi tinggi terhadap program, namun kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Struktur birokrasi telah terbentuk dengan baik, namun fragmentasi dan kendala koordinasi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan komunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, serta perbaikan mekanisme koordinasi antar pihak agar pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci:
Implementasi
Kebijakan publik
Pengelolaan
Sampah organik
TPST

Keywords:
Implementation
Public policy
Management
Organic waste
TPST

Abstract

This study aims to analyze the implementation of waste management policies through the TPST 3R Mulyoagung Bersatu program in Mulyoagung Village, Dau District, Malang Regency, using the Edward III theory approach which includes communication variables, resources, disposition, and bureaucratic structure. The main problem in this study is the low effectiveness of waste management policies, which can be seen from the lack of public awareness in sorting waste and not optimal coordination between implementers. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants consisted of the village government, TPST managers, and the local community. The results show that policy communication has been carried out through socialization, but has not fully reached all levels of society. Human resources are available, but there are still limitations in technical and financial aspects. The disposition of implementers shows a positive attitude and high dedication to the program, but public awareness still needs to be improved. The bureaucratic structure has been well established, but fragmentation and coordination constraints are still obstacles to implementation in the field. Recommendations from this study are the need to strengthen more effective and sustainable communication, increase community capacity through education, and improve coordination mechanisms between parties so that sustainable waste management can be achieved optimally.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment>

Submit: 02-05-2025

Accepted: 12-05-2025

Published: 13-05-2025

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman suku, bangsa, dan bahasa. Namun, di balik kekayaan tersebut, negara ini menghadapi berbagai

permasalahan lingkungan yang kompleks, salah satunya adalah permasalahan sampah. Sampah telah menjadi isu serius yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara di dunia. Sampah, terutama yang

berasal dari sisa makanan atau benda-benda yang tidak lagi digunakan oleh manusia, sering kali dipandang sebagai sesuatu yang menjijikkan dan kotor. Persepsi negatif ini mempengaruhi sikap masyarakat, yang cenderung abai terhadap potensi bahaya lingkungan akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik. Baik sampah organik maupun anorganik berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan jika tidak ditangani secara tepat (Elamin et al., 2018).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan limbah adalah pengelolaan sampah organik. Menurut Natamas (2018), pendekatan berkelanjutan terhadap pengelolaan sampah organik diperlukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien. Penelitian mereka menekankan pentingnya proses pengomposan yang efisien dan penggunaan teknologi anaerobik untuk menghasilkan biogas, serta perlunya edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Pengelolaan ini tidak hanya berpotensi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan produk yang bernilai guna. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, implementasi pengelolaan sampah di Indonesia belum optimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain timbunan sampah yang tidak terkontrol, perilaku konsumtif masyarakat, serta belum menyeluruhnya sistem pengelolaan sampah (Haryanti et al., 2020).

Kondisi tersebut juga tercermin di tingkat lokal, seperti yang terjadi di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 7 Oktober 2024, diketahui bahwa Desa Mulyoagung telah memiliki dasar hukum dalam pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012. Peraturan ini menjadi fondasi bagi program "Mulyoagung Bersih", yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu. Namun demikian, pelaksanaan pengelolaan sampah organik di desa ini masih menemui

berbagai kendala. Salah satu masalah yang menonjol adalah buruknya sistem pengelolaan sampah organik, yang menyebabkan pencemaran tanah dan udara serta menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan sekitar.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan sampah organik di Desa Mulyoagung meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah, serta terbatasnya fasilitas pendukung. Edukasi dan sosialisasi yang belum maksimal turut menjadi hambatan dalam membangun kesadaran kolektif. Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan, sehingga diperlukan strategi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Saat ini, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di desa ini dijalankan melalui program Bank Sampah dan penyediaan sarana pendukung oleh pemerintah desa. Program ini bertujuan mendorong kesadaran dan praktik pengelolaan sampah berkelanjutan. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari minimnya pelatihan, keterbatasan anggaran, hingga kurangnya inovasi dalam metode edukasi.

Azima & Macella (2024) menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan sampah harus mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat serta mengedepankan praktik daur ulang. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan di Desa Mulyoagung perlu ditinjau ulang guna mengidentifikasi hambatan dan potensi perbaikan. Infrastruktur juga menjadi aspek penting yang seringkali terabaikan. Seperti disampaikan oleh Prasetyo (2020) banyak desa yang belum memiliki fasilitas seperti tempat pengomposan atau alat pengolah limbah organik. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kebijakan pengelolaan akan sulit terlaksana secara efektif. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah desa dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, sangat krusial dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Hidayat, 2022).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat indikasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Beberapa warga mulai menunjukkan inisiatif untuk mengurangi limbah organik dari rumah tangga mereka. Fenomena ini menjadi peluang penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah organik dijalankan di Desa Mulyoagung serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan menjadi rujukan bagi desa-desa lain yang menghadapi tantangan serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah organik di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dalam konteks yang alami, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019) bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi wajar dan tidak dimanipulasi.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif di Desa Mulyoagung karena desa ini tengah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah organik yang melibatkan masyarakat secara aktif. Fokus penelitian diarahkan pada proses implementasi kebijakan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami dan terlibat langsung dalam pengelolaan sampah. Informan terdiri dari Kepala Desa, petugas kebersihan, perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan masyarakat

desa. Total terdapat lima orang informan dengan klasifikasi sebagai informan kunci dan pendamping.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa dokumen desa, peraturan, dan literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak terstruktur untuk mengamati langsung aktivitas pengelolaan sampah, wawancara mendalam yang dilakukan secara fleksibel untuk menggali informasi dari informan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, arsip, dan literatur terkait.

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, meliputi empat tahapan: pengumpulan data, kondensasi data (reduksi), penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Analisis dilakukan secara simultan sepanjang proses penelitian untuk menjaga kedalaman dan keakuratan interpretasi data.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sumber yang sama. Validitas data juga diperkuat melalui perpanjangan waktu pengamatan dan konfirmasi ulang dengan informan (*member check*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan serius yang belum tertangani dengan baik, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, bahkan berpotensi menjadi masalah sosial. Menurut UU No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam berbentuk padat. Sayangnya, pengelolaan sampah di banyak kota Indonesia masih menggunakan metode konvensional "kumpul-angkut-buang" yang seringkali tidak sesuai standar teknis dan mengakibatkan pencemaran. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan

gaya hidup, dan tingkat pendidikan turut memperparah volume dan keragaman sampah, yang jika tidak dikelola dengan benar akan mencemari lingkungan.

Sebagai contoh spesifik, Desa Mulyoagung di Kabupaten Malang mengalami tekanan akibat pertumbuhan penduduk yang pesat karena lokasinya yang berbatasan dengan Kota Malang dan Batu. Peningkatan jumlah penduduk ini menyebabkan lahan kosong berkurang, volume sampah meningkat drastis, dan menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran sungai Brantas dan potensi banjir. Meskipun telah ada upaya pengelolaan melalui TPS Mulyoagung Bersatu (program TPST 3R) serta didukung oleh peraturan daerah (Perda Kab. Malang No. 2/2018) dan peraturan desa (Perdes Mulyoagung No. 2/2012), tantangan pengelolaan sampah akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan karakteristik masyarakat dari perdesaan ke perkotaan tetap signifikan.

Komunikasi Kebijakan

Menurut teori implementasi kebijakan dari Edward III, komunikasi merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Komunikasi yang dimaksud mencakup penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana dan masyarakat, serta pemahaman yang jelas terhadap isi kebijakan tersebut agar tidak terjadi penafsiran ganda. Dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung, komunikasi dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, serta edukasi langsung kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang diterapkan bersifat dua arah. Pemerintah desa tidak hanya menyampaikan informasi melalui forum formal seperti pertemuan dan pelatihan, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat seperti RT dan RW, serta memberikan akses langsung kepada masyarakat untuk menyaksikan proses pengolahan sampah di TPST. Hal ini sejalan dengan prinsip Edward III, di mana kejelasan isi

dan konsistensi komunikasi sangat penting untuk menghindari ambiguitas dalam implementasi kebijakan.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Baskoro & Kurniawan (2021) Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang menekankan bahwa keberhasilan penanganan sampah sangat ditentukan oleh komunikasi aktif antara pemerintah dan masyarakat. Sama halnya dengan di Mulyoagung, penekanan pada sosialisasi reguler dan pelibatan tokoh lokal menjadi kunci keberhasilan.

Penelitian oleh Komarudin et al. (2023) di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, juga menegaskan pentingnya komunikasi lintas sektoral, di mana kolaborasi antara pemerintah, RT/RW, dan kelompok masyarakat memperkuat pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga. Ini tercermin pula dalam pendekatan TPST 3R Mulyoagung yang melibatkan berbagai lapisan hingga tingkat kecamatan.

Sementara itu, Hansyar (2022) dalam studi di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan ini menjadi kontras yang memperjelas bahwa keberhasilan Desa Mulyoagung tidak lepas dari peran komunikasi yang dilakukan secara masif dan terstruktur.

Dengan demikian, dari perspektif Edward III, komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung telah berjalan efektif. Pendekatan dua arah, pelatihan, dan edukasi langsung memperkuat pemahaman serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh intensitas, kejelasan, dan konsistensi komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat.

Sumber Daya Kebijakan

Dalam teori implementasi kebijakan menurut Edward III, terdapat empat variabel utama yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Fokus pembahasan ini adalah pada aspek sumber daya, sebagaimana terlihat pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di TPST 3R Mulyoagung Bersatu.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa sarana dan prasarana di TPST Mulyoagung cukup lengkap dan memadai. Fasilitas seperti motor sampah, gerobak, dump truck, gedung pemilahan, serta alat pengayakan dan pencacah kompos telah tersedia dan digunakan secara efektif. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung operasional pengelolaan sampah yang terstruktur dan efisien. Hal ini sejalan dengan konsep Edward III yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya fisik seperti perlengkapan kerja sangat penting agar pelaksana kebijakan mampu menjalankan tugas secara optimal.

Namun demikian, kelemahan yang masih ditemukan adalah keterbatasan tenaga kerja, sebagaimana diungkapkan oleh petugas kebersihan dan staf administrasi TPST. Dengan total 107 pegawai, mayoritas berperan sebagai petugas lapangan, namun jumlah tersebut masih dirasa kurang untuk mengimbangi volume kerja harian. Edward III menekankan bahwa human resources yang memadai dan kompeten sangat berpengaruh terhadap kelancaran implementasi kebijakan. Kekurangan tenaga kerja ini bisa menjadi hambatan utama meskipun fasilitas sudah lengkap, karena pelaksana kebijakan menjadi terlalu terbebani.

Hasil ini relevan dengan penelitian Baskoro & Kurniawan (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Taman, Sidoarjo mengalami kendala serupa, yakni keterbatasan SDM meskipun fasilitas pendukung sudah memadai. Begitu pula dalam penelitian Komarudin et al. (2023) di Kecamatan Indihiang, ditemukan bahwa kurangnya jumlah dan kualitas tenaga

pelaksana berdampak pada tidak optimalnya pemilahan dan pengangkutan sampah. Sementara itu, Hansyar (2022) menegaskan bahwa selain fasilitas, pelatihan dan distribusi tugas yang merata juga menjadi kunci sukses implementasi program pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kecukupan sarana prasarana, tetapi juga pada kecukupan dan kemampuan sumber daya manusia. Untuk TPST Mulyoagung Bersatu, diperlukan penambahan tenaga kerja dan pelatihan teknis agar seluruh potensi fasilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini akan memperkuat efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat desa, sesuai kerangka implementasi Edward III.

Disposisi Kebijakan

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan salah satu komponen penting dalam teori implementasi kebijakan Edward III. Disposisi mencerminkan sejauh mana para pelaksana memahami, menerima, dan berkomitmen terhadap kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks pengelolaan sampah di TPST 3R Mulyoagung Bersatu, aspek disposisi ini terlihat dalam penerapan pemilahan sampah dan sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemilahan sampah organik dan nonorganik secara teknis telah diterapkan di TPST, bahkan didukung oleh pelatihan kepada masyarakat seperti diungkapkan oleh Ibu Baimah. Pelatihan ini mencakup teknik pemilahan, metode daur ulang, serta strategi pengurangan volume sampah. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan pemahaman dari sebagian pelaksana terhadap kebijakan yang berlaku, mencerminkan disposisi positif dalam konteks Edward III.

Namun demikian, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rahma, masih banyak masyarakat yang belum menaati kebijakan, terlihat dari banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Ini menandakan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan efektif karena belum sepenuhnya didukung oleh kesadaran dan sikap positif masyarakat. Dalam kerangka Edward III, kelemahan pada aspek disposisi ini dapat menghambat implementasi secara menyeluruh, meskipun infrastruktur dan sumber daya tersedia.

Rendahnya partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan adanya kesenjangan koordinasi antara pemerintah desa dan warga. Hal ini memerlukan upaya penguatan komunikasi dan edukasi publik agar pemahaman serta kesediaan masyarakat dalam menjalankan kebijakan semakin meningkat. Disposisi tidak hanya berlaku untuk pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga mencakup masyarakat sebagai bagian dari pelaku pengelolaan sampah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Baskoro & Kurniawan (2021) yang menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu penghambat keberhasilan kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman. Demikian pula dengan studi Komarudin et al. (2023) di Kecamatan Indihiang yang menemukan bahwa disposisi masyarakat masih lemah karena kurangnya edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Sementara itu, Hansyar (2022) menggarisbawahi pentingnya pembinaan berkelanjutan untuk membentuk sikap positif masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu memerlukan penguatan disposisi baik dari pelaksana teknis maupun masyarakat. Sosialisasi yang intensif, pelatihan yang berkelanjutan, serta pengawasan yang konsisten menjadi kunci penting untuk meningkatkan sikap kooperatif seluruh elemen masyarakat, sehingga pengelolaan

sampah berbasis pemilahan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Struktur Birokrasi

Dalam teori implementasi kebijakan Edward III, struktur birokrasi memainkan peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik. Dua elemen utama dari struktur birokrasi menurut Edward III adalah *standard operational procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP mengatur proses kerja yang sistematis dan seragam, sedangkan fragmentasi berkaitan dengan penyebaran tanggung jawab antar lembaga atau unit yang menuntut koordinasi lintas pihak.

Berdasarkan penelitian di TPST 3R Mulyoagung Bersatu, terlihat bahwa struktur birokrasi telah dibentuk dengan baik dan terorganisir dalam beberapa tingkatan, mulai dari pengurus utama, staf administrasi, hingga petugas lapangan. Adanya pembagian tugas yang jelas ini mencerminkan penerapan SOP secara efektif. Setiap bidang memiliki tanggung jawab spesifik, seperti pengumpulan, pengolahan, hingga penyuluhan kepada masyarakat, yang mendukung tercapainya efisiensi kerja dan pelayanan yang optimal dalam pengelolaan sampah.

Dari sisi fragmentasi, terdapat kolaborasi antara Pemerintah Desa Mulyoagung, TPST 3R, dan kelompok masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa dan staf administrasi TPST. Fragmentasi ini dapat menjadi kekuatan apabila koordinasi antar pihak berjalan lancar. Namun, berdasarkan wawancara dengan Ibu Rahma, masih terdapat tantangan koordinatif dalam hal komunikasi dan pemahaman antara petugas dan masyarakat, yang bisa menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, meskipun struktur birokrasi telah tersedia, tantangan implementasi tetap muncul jika fragmentasi tidak diiringi dengan komunikasi lintas sektor yang baik.

Temuan ini relevan dengan penelitian Baskoro & Kurniawan (2021) yang menyoroti lemahnya struktur birokrasi dan koordinasi sebagai penghambat utama dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman. Sama halnya, Komarudin et al. (2023) juga menekankan bahwa kelemahan pada struktur birokrasi, terutama koordinasi antar unit, menjadi kendala dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Tasikmalaya. Penelitian Hansyar (2022) mendukung hal ini, menyatakan bahwa meskipun struktur organisasi pengelolaan sampah di Pidie telah dibentuk, kurangnya integrasi dan keterlibatan lintas pihak menyebabkan implementasi program kurang optimal.

Dengan demikian, implementasi struktur birokrasi yang baik harus disertai penguatan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait. Pemerintah desa, sebagai aktor utama, perlu memperkuat edukasi dan pelibatan masyarakat serta melakukan evaluasi berkala terhadap alur kerja yang telah ditetapkan. Struktur yang kuat tanpa koordinasi yang efektif hanya akan menghasilkan birokrasi yang kaku dan kurang adaptif terhadap dinamika sosial di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dan evaluatif menjadi kunci untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung secara berkelanjutan.



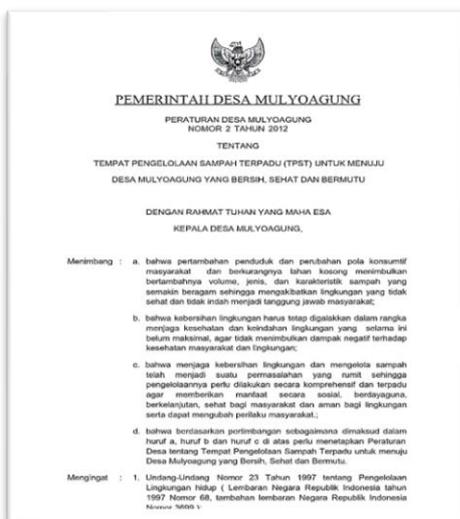
Gambar 2. Pemberian sosialisasi Kepada Masyarakat Mulyoagung



Gambar 3. Fasilitas Di TPST 3R Mulyoagung Bersatu



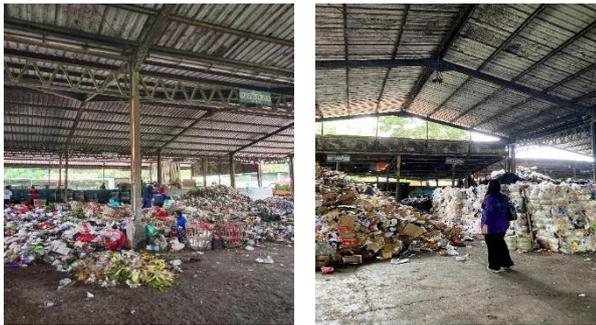
Gambar 4. Tempat Pemilahan Sampah dan Alat Pengayakan Kompos di TPST 3R Mulyoagung Bersatu



Gambar 1. Perdes Desa Mulyoagung No 2 Tahun 2012 Tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)

Tabel 1. Jumlah Pegawai di TPST 3R Mulyoagung Bersatu

No	Bidang/Profesi	Jumlah (Orang)
1	Pekerja Oprasional (3 Zona Kerja)	41
2	Petugas Pengangkut Sampah	59
3	Staf Administrasi	2
4	Linmas/security	3
5	Pengurus Koprasi Pegawai	2
Total Pekerja		107



Gambar 5. Pemlahan Sampah Organik dan Non Organik



Gambar 6. Struktur Organisasi TPST 3R Mulyoagung Bersat



Gambar 7. Proses Kerja TPST Mulyoagung Bersatu

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di TPST 3R Mulyoagung Bersatu, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung dapat dikatakan telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Melalui pendekatan teori Edward III, ditemukan

bahwa keempat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, masing-masing memiliki kontribusi dan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan. Dari aspek komunikasi, informasi mengenai program TPST 3R telah disampaikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, namun efektivitasnya masih rendah karena belum seluruh masyarakat memahami dan menjalankan pemilahan sampah secara konsisten. Dalam hal sumber daya, TPST telah memiliki sarana, tenaga kerja, serta pelatihan yang memadai, namun masih terbatas dalam hal anggaran dan alat pendukung teknis. Sikap pelaksana atau disposisi menunjukkan komitmen yang tinggi, baik dari pemerintah desa maupun pengelola TPST, yang tercermin dari keterlibatan aktif dalam menyampaikan tujuan dan manfaat program kepada masyarakat. Namun, keberhasilan pelaksanaan juga sangat bergantung pada kesadaran masyarakat, yang dalam praktiknya masih menjadi kendala utama. Struktur birokrasi TPST 3R Mulyoagung sudah terbentuk secara sistematis, dengan pembagian tugas yang jelas dan mekanisme koordinasi antar pihak. Meskipun demikian, fragmentasi tanggung jawab dan kurangnya sinkronisasi antar aktor pengelola terkadang menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Secara keseluruhan, diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan komunikasi yang lebih efektif, serta pengembangan kapasitas masyarakat agar pengelolaan sampah berbasis partisipatif dan berkelanjutan di Desa Mulyoagung dapat terwujud secara menyeluruh dan berdaya guna.

REFERENSI

- Azima, N., & Macella, A. D. R. (2024). Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat. *SAWALA: Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 296–309. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/8995>
- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman

- Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 9(2), 149–158.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/38164>
- Elamin, A., Yuliana, R., & Prasetya, R. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurnal Lingkungan Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 367–374.
<https://jurnal.unpad.ac.id/jkp/article/view/18052>
- Haryanti, S., Gravitaniani, E., & Wijaya, M. (2020). Studi Penerapan Bank Sampah dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta. *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi*, 6(1), 60–68.
<https://doi.org/10.23917/bioeksperimen.v6i1.10434>
- Hidayat, S. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 8(1).
<https://journal.ipdn.ac.id/index.php/jtp/article/view/1923>
- Komarudin, A., Rosmajudi, A., & Hilman Program Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya, A. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indhiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 3(4), 41–49.
<https://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/105/90>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Fourth Edition. In *The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods*.
- Muliawan Hansyar, R. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pengelolaan Sampah Di Sigli Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, 12(1), 59.
<http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR>
- Natamas, R. S. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan* [IPDN].
<http://eprints.ipdn.ac.id/1264/>
- Prasetyo, B. (2020). Infrastruktur dan Kebijakan Pengelolaan Sampah Desa. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota (JPWK)*, 16(3), 110–117.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpwk/article/view/7358>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.